

Abstrak

Moh trinaldy kadir. 2009. Tinjauan yuridis tugas wakil menteri dan sekretaris jenderal kementerian. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri gorontalo. Pembimbing 1 Prof. Dr. Johan Jasin,S.H.,M.Hum dan Pembimbing 2 Zamroni Abdussamad,S.H.,M.H

Dalam suatu kementerian, terdapat jabatan wakil menteri, sesuai dengan ketentuan pasal 10 undang-undang no 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara. Akan tetapi, pengaturan tugas wakil menteri ini sebagaimana diatur dalam Perpres no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri bertabrakan dengan pasal 10 undang-undang no 30 tahun 2008.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai wakil menteri. Masalah yang diteliti adalah pengaturan tugas wakil menteri menurut peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan di dukung oleh sumber data sekunder. Tehnik analisis dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait wakil menteri.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tugas wakil menteri tidak bersesuaian antara pasal 10 undang-undang no 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara dengan pasal 3 peraturan presiden no 60 tahun 2012 tentang wakil menteri dan tugas wakil menteri bertabrakan dengan tugas dari sekretariat jenderal kementerian.

Kata kunci : undang-undang, wakil menteri, sekretaris jenderal